

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perusahaan merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan Nilai perusahaan, dan dengan demikian nilai jangka panjang yang diharapkan investor dapat tercapai dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya tetap diperhatikan (*CMA Act*, 2002). Mang'unyi (2011) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai sistem kebijakan, proses, dan manajemen internal organisasi yang mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan memantau dan mengatur manajemen, serta operasi perusahaan untuk memastikan bahwa itu dilakukan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab, dengan integritas.

Konsep tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh penelitian Cadbury (2002) yang menyebutkan bagaimana tata kelola perusahaan mengelola dan mengendalikan aktivitas kerja perusahaan. Namun, dikatakan bahwa tata kelola perusahaan bisa baik atau buruk, efektif atau tidak efektif, tergantung pada apa yang dimasukkan dalam praktik tata kelola perusahaan dan juga didasarkan pada karakteristik atau nilai kualitas yang terkait dengannya.

Penelitian Bhagat & Bolton (2019) mengemukakan bahwa sejak awal abad ke-21 banyak krisis keuangan dan runtuhnya perusahaan karena tata kelola perusahaan yang buruk, seperti beberapa penelitian telah menganalisis

baik secara empiris maupun teoritis mengenai peran tata kelola perusahaan selama pandemi COVID-19 (Jebran & Chen, 2021; Khatib & Nour, 2021). Banyak teori dan hipotesis, seperti teori keagenan, terus berkembang dan secara efektif menjelaskan penyebab masalah tata kelola perusahaan. Pada saat yang sama, semakin banyak peraturan, termasuk *Sarbanes Oxley Act*, *Dodd-Frank Act*, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada negara G20/OECD, yang mendorong pedoman tata kelola perusahaan menjadi tinggi dan universal.

Akibat krisis keuangan dan runtuhnya perusahaan, kepercayaan para pemegang saham di pasar modal menjadi terguncang. Dengan demikian, pemerintah atau otoritas di seluruh dunia mengharuskan perusahaan untuk mematuhi kode praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi biaya keagenan (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Prabantarikso, 2021). Dengan demikian, setelah menggunakan sistem tata kelola yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajerial mereka dan memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingannya.

Penelitian Andrei Shleifer & Vishny (1997) dan Bebchuk et al. (2009) dalam (Handajani, 2014) membuktikan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk memiliki kinerja operasi yang lebih rendah. Sementara itu, perusahaan dengan tata kelola yang baik menunjukkan kinerja keuangan dan nilai pasar yang lebih tinggi. Praktik tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan tidak hanya memberikan lebih banyak hak kepada pemegang sahamnya. Arnott & Asness (2003) dalam (Susilawati, 2018) menjelaskan

bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik membayar dividen lebih banyak kepada pemegang sahamnya. Javed & Iqbal (2006) menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menurunkan biaya produksi dan mengurangi praktik manajemen yang buruk melalui pengungkapan yang transparan pada perusahaan di Pakistan.

Kinerja keuangan digunakan untuk menghitung efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kapasitas manajemen untuk menetapkan tujuan atau instrumen yang tepat dalam mencapai tujuan tertentu disebut sebagai efektivitas perusahaan. Rasio input terhadap output ketika input yang tepat menghasilkan output terbaik disebut sebagai efisiensi perusahaan. Laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan tersebut digunakan oleh investor dan manajer untuk membuat pilihan investasi yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan pada kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan untuk menarik calon investor.

Krisis ekonomi di akhir tahun 90-an merupakan titik balik dalam sejarah standar tata kelola perusahaan di BUMN Indonesia. Kegagalan perusahaan besar dan krisis keuangan di berbagai negara telah menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan. Pemerintah didorong untuk mengubah struktur tata kelola perusahaan selama krisis ekonomi saat itu (Kurniawan & Indriantoro, 2000). Menanggapi hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan antara lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan kalangan profesional tertentu untuk membentuk beberapa inisiatif untuk

tata kelola perusahaan, seperti pembentukan *National Committee on Corporate Governance* (NCCG).

Pemerintah menyadari perlunya membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur BUMN secara lebih komprehensif untuk mendukung pertumbuhan korporasi sebagai bagian dari upaya menciptakan landasan yang kuat bagi praktik tata kelola perusahaan yang baik di BUMN

Indonesia. Persyaratan ini dipenuhi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Undang-undang tersebut telah berhasil menyelesaikan kerangka hukum bagi BUMN, tetapi tidak secara langsung menangani masalah tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, terdapat berbagai kode atau standar tata kelola perusahaan yang baik yang dapat digunakan oleh BUMN sebagai acuan dalam penerapan *good corporate governance* (GCG), seperti *OECD Guidelines* dan *KNKG Code*. Meskipun standar-standar tersebut tidak esensial, namun merupakan sumber daya yang berguna yang dapat digunakan oleh BUMN dalam menerapkan GCG. Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN memberikan acuan hukum di bidang ini.

Indonesia memperbarui struktur peraturan sektor keuangan pada tahun 2011 dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Stabilitas keuangan yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dicermati oleh OJK. Tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satu kontribusi paling signifikan untuk tujuan ini. Jika rencana tersebut berlaku tanpa dampak, maka akan meningkatkan kinerja ekonomi dan merangsang pertumbuhan dalam jangka panjang. Demikian

kesimpulan yang dicapai oleh peneliti Hadad et al. (2004). Tata kelola yang baik di Indonesia seharusnya meningkatkan *return* pemegang saham sambil memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa contoh masalah keagenan yang terjadi di Indonesia adalah informasi asimetris, manipulasi laba (Herawaty, 2008), pemanfaatan utang yang berlebihan (Wiliandri, 2011) dalam (Taufik, 2017), dan tidak membagikan arus kas bebas dalam bentuk dividen kepada pemegang saham (Mai, 2010). Masalah lain yang muncul di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kepemilikan saham institusional, yang merupakan pemegang saham major, mengambil alih saham yang dimiliki oleh investor minor. Selain itu, investor major mungkin bekerja sama dengan manajemen untuk menaklukkan atau memanfaatkan investor minor. Pemegang saham institusi, di sisi lain, mungkin lebih efektif memantau perilaku manajerial sebagai pemegang saham pengendali karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh pemegang saham biasa (Lotto, 2013).

Penelitian telah dilakukan mengenai dampak tata kelola perusahaan yang efektif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, masih terdapat perbedaan temuan sebelumnya. Bukti bahwa kinerja keuangan dapat ditingkatkan oleh dewan komisaris dan kualitas audit ditemukan oleh Mashitoh & Irma (2013) dengan menggunakan sampel bank di Indonesia. Sebagai perbandingan, Hermiyetti & Manik (2013) meneliti dampak tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja keuangan 440 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2006 dan 2010, dan mereka

menyimpulkan bahwa, kecuali perusahaan keuangan, tidak terdapat korelasi antara keduanya.

Peneliti Wu et al. (2009) menemukan bahwa komisaris independen yang kompeten lebih siap untuk membuat penilaian yang tidak memihak dan mengawasi manajemen secara efektif. Konsekuensinya, aktivitas manajer hanya untuk keuntungan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk meningkatkan kinerja keuangan, dan pilihan tidak dibuat untuk menguntungkan individu tertentu. Agar dewan komisaris menjadi efektif, Ahmed & Hamdan (2015) berpendapat bahwa diperlukan anggota yang tidak memihak. Dengan demikian, semakin banyak komisaris independen, semakin baik kinerja keuangannya.

Tata kelola perusahaan yang baik telah terbukti berdampak kecil terhadap kinerja keuangan dalam studi Page & Abdullah (2009), Coskun & Sayilir (2012), dan Peters & Bagshaw (2014). Pelaporan keuangan yang tidak menyertakan audit dapat berkontribusi pada hal ini, sehingga tidak dapat membantu pengguna laporan keuangan membandingkan hasil secara efektif.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa beberapa faktor, termasuk tata kelola yang baik, berkontribusi terhadap kinerja keuangan. Perbedaan ini memberi kesempatan untuk meneliti mengenai hal ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana berbagai komponen tata kelola perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit mempengaruhi kinerja keuangan BUMN Indonesia.

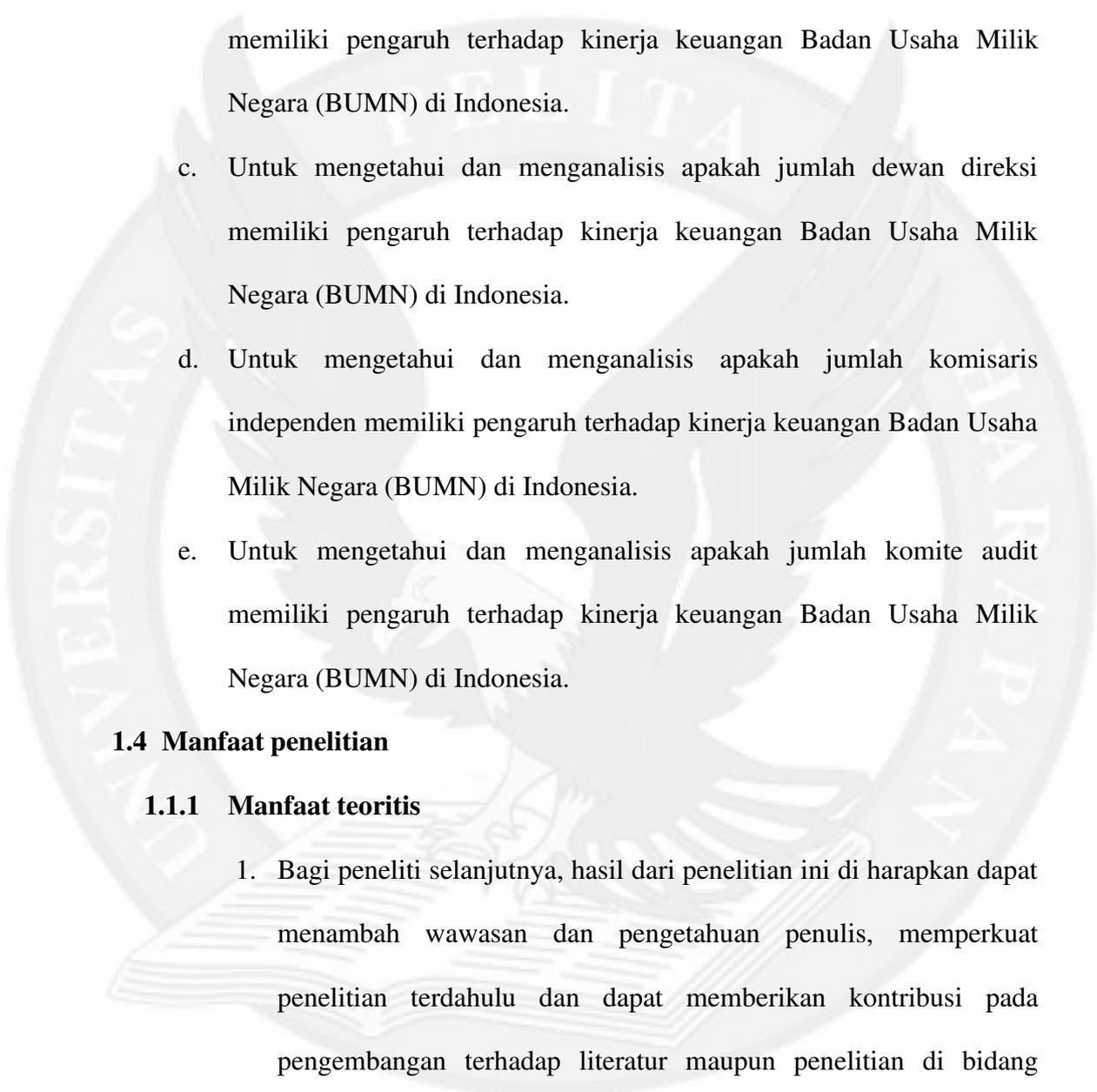
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?
- b. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?
- c. Apakah jumlah dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?
- d. Apakah jumlah komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?
- e. Apakah jumlah komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diperoleh dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut.

- 
- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
 - d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
 - e. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

1.1.1 Manfaat teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, memperkuat penelitian terdahulu dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang manajemen.

2. Bagi Kampus Tercinta hasil penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi untuk menambah Informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak.

1.1.2 Manfaat praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja keuangan. Selain itu, di harapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah dan dapat mengimplementasikan ilmu telah di peroleh selama masa perkuliahan.
2. Bagi Perusahaan, dapat di jadikan sebagai masukan untuk pimpinan Perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan.
3. Bagi akademisi, bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi serta berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap kajian teori dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit dan kinerja keuangan.

1.5 Batasan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman dari peneliti agar lebih jelas dan terarah serta tidak menyimpang dari topik permasalahan. Adapun batasan penelitian ini yaitu

1. Komponen tata kelola perusahaan pada penelitian ini terbatas pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit dan kinerja keuangan, serta tidak meneliti komite tata kelola, komite pemantau risiko dan komite nominasi dan remunerasi.
2. Periode penelitian yang digunakan 2015-2021.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
4. Pada penelitian ini tidak dilakukan pemisahan setiap sektor usaha dari BUMN baik itu *financial services* dan *non-financial services*.

1.6 Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk mempermudah pemahaman, maka disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang merupakan kajian kerangka teoritis. Dalam hal ini berisi tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ketiga diuraikan metode penelitian yang terdiri dari: populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, hipotesis operasional, dan metode analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi tentang hasil analisis data dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian.

